

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penelitian ini telah menggambarkan Konflik Penertiban Tambak Udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tahun 2014. Adapun kesimpulan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab utama dari Ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik ini menjadi titik puncak terjadinya konflik. Konflik tambak udang ini terjadi karena akibat kurang suburnya lahan disekitar tambak udang yang merupakan lahan pertanian masyarakat. Jika dilihat dari segi ekonomi, keuntungan yang besar menjadi faktor utama maraknya tambak udang liar di pesisir Pantai Pelatan Kabupaten Bantul.
2. Secara teoritis faktor yang memberikan pengaruh paling besar adalah faktor sikap elit pemerintah. Inkonsistensi janji yang diberikan memperburuk situasi konflik yang terjadi.
3. Adanya ketidaksesuaian argumen yang disampaikan oleh BLH kepada media dan apa yang ditemukan oleh peneliti mengenai kajian terkait dampak dari aktifitas tambak udang disepanjang Pantai Selatan.

4. Landasan hukum yang dipakai antara Pemerintah Daerah kabupaten Bantul dan para petambak berbeda Pemerintah Kabupaten Bantul memakai Perda RT RW nomor 4 tahun 2011, sedangkan para pemilik tambak memakai Perda provinsi nomor 16 tahun 2011, hal ini yang menjadi penyebab sulitnya melakukan penertiban karena di satu sisi para petambak sudah benar dengan apa yang mereka lakukan dengan menggunakan landasan hukum yang mereka pakai, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul sulit melakukan pemahaman kepada pemilik tambak karena memakai landasan hukum yang berbeda, pemerintah daerah juga tidak bisa menyalahkan landasan hukum yang petambak pakai karena itu merupakan perda provinsi, kurangnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penyebab perbedaan itu muncul.
5. Diabaikannya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas tambak udang oleh para pemilik tambak.
6. Resolusi konflik yang sudah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bantul yakni dengan metode resolusi konflik pengaturan sendiri bisa dikatakan gagal karena kurangnya ketegasan dan inkonsistensi dari pemerintah. Pemerintah perlu merealisasikan janji untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kurang intensnya komunikasi yang dibangun pemerintah dalam menyelesaikan konflik hal ini yang mengakibatkan sulit tercapainya solusi.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi yang menurut hemat peneliti merupakan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan beberapa pihak. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah :

1. **Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diharapkan Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat mengarahkan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini sehingga hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menjadi data dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. **BAPPEDA Kabupaten Bantul, Dinas Satpol PP Kabupaten Bantul, BLH Kabupaten Bantul**

Diharapkan pihak BAPPEDA Kabupaten Bantul, Dinas Satpol PP Kabupaten Bantul, BLH Kabupaten Bantul dan SKPD terkait setelah mengetahui bagaimana analisa konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul lebih berperan aktif lagi. Bukan hanya dalam mencari solusi penyelesaian tetapi melakukan kajian-kajian terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktifitas tambak udang. Hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah

kabupaten Bantul dalam menyelesaikan konflik penertiban tambak udang di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Sering melakukan kajian mengenai akibat dampak yang ditimbulkan dari aktifitas tambak udang. Kemudian, terkait dengan inkonsekuensi pemerintah Kabupaten Bantul agar tidak menimbulkan konflik baru dikemudian hari.

3. Masyarakat

Diharapkan kepada responden yang telah berkontribusi dalam penelitian ini agar mereka terus menyampaikan aspirasi mereka, terus mengawal janji pemerintah agar realsisasinya sesuai dengan apa yang dijanjikan.

4. Bangun dan buka ruang dialog antara pemerintah dan warga terutama mereka yang merasakan dampak langsung aktifitas tambak udang. Dalam konflik penertiban tambak udang, pemerintah diharapkan merangkul kembali warga yang sudah terlanjur kecewa karena janji pemerintah yang sampai saat ini belum terealisasi, tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik lagi dengan warga yang sudah terlanjur kecewa. Namun tak ada pilihan lain yang paling strategis bagi pemerintah daerah kecuali untuk merealisasikan janji penutupan tambak udang yang sudah terlanjur disampaikan kepada masyarakat.
5. Perlu menghadirkan pihak ketiga yang netral dan dipercaya, terutama oleh warga yang terkena dampak langsung, untuk memediasi konflik

dan merangkul semua pihak yang terlibat dalam konflik. Kegagalan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik perlu menjadi pertimbangan besar dalam menangani konflik tersebut tanpa adanya pihak ketiga.

6. Libatkan masyarakat dalam setiap proyek atau rencana yang disusun pemerintah sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.
7. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara empiris penundaan penutupan tambak udang terkait dengan momentum pemilihan kepala daerah. Hal tersebut sangat startegis bagi para calon bupati dan wakil bupati yang baru untuk mencari simpatik masyarakat. Hal ini yang menjadi isu cukup besar dalam konflik penertiban tambak udang, momentum tersebut harusnya tidak dijadikan suatu momen untuk mencari simpatik masyarakat. Terkait hal ini perlu adanya klarifikasi dari pihak Pemerintah khususnya Bupati Bantul yang didukung pula oleh klarifikasi SKPD yang menangani konflik tambak udang.